

Sahabat ORTI

ARMAN SYIFA

Hot Items

Komunitas Gowes dan
Olahraga *Gateball*



PAST

FUTURE

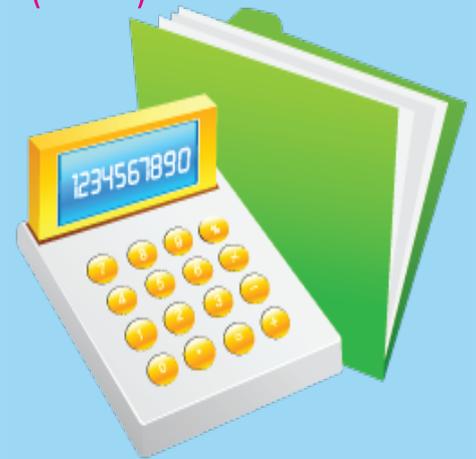
CASH

Item reported in the fourth
quarter (oct)



ACCRUAL

Item reported in the second
quarter (June)



JALAN PANJANG MENUJU

AKRUAL



SALAM REDAKSI

Om Swastiastu

Tak terasa sudah tiga bulan berlalu sejak ORTI Edisi XXIII kami terbitkan pada April 2015. ORTI kini hadir lagi dengan tampilan dan warna yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Ini kami lakukan tidak lain untuk memberikan tampilan yang lebih *fresh* dan tidak membosankan.

ORTI kali ini mengambil fokus utama mengenai *accrual based accounting* atau sistem akuntansi berbasis akrual. Tema ini diambil sejalan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yang mulai 2015 sudah dijalankan oleh pengelola keuangan negara/daerah.

Kami sangat memahami bahwa tema ini mungkin sudah cukup dipahami oleh para pembaca setia ORTI. Kami berharap melalui tema ini, setidaknya dapat memberikan gambaran umum mengenai *Accrual Based Accounting* kepada para pembaca setia ORTI, tanpa bermaksud menggurui.

Selain tema utama, ORTI tidak lupa menghadirkan rubrik Sahabat ORTI. Kali ini yang diangkat adalah profil Kepala Perwakilan, Arman Syifa. Bagi yang ingin mengenal lebih dekat sosok beliau, wajib baca rubrik yang satu ini. Ditulis dengan gaya yang santai dan jauh dari kesan formal oleh wartawan handal kami, mas Khibran.

Kami juga punya artikel menarik mengenai hobi yang sedang menjadi *trend* di kantor kita tercinta, yaitu olahraga bersepeda dan *gateball*. Mungkin masih banyak diantara kita yang belum tau jika sekarang sudah ada komunitas sepeda di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Komunitas ini menyebut diri mereka, Gowes BPK Bali. Kami kupas lebih dalam di hal 6.

Untuk para pecinta Teka-Teki Seru, jangan lupa ditunggu partisipasinya yah.. Hadiah menarik masih kami siapkan untuk lima pengirim pertama ke redaksi ORTI.

Selamat Membaca.

Om Santhi Santhi Santhi Om

daftar isi...

	Salam Redaksi	Hal 2
	Sahabat ORTI Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali.....	Hal 3
	Fokus <i>Accrual Accounting</i>	Hal 4
	Seputaran Perwakilan Berita pilihan BPK Perwakilan Prov. Bali	Hal 6
	Hot Items Komunitas Gowes dan Olahraga <i>Gateball</i>	Hal 7
	Teka-Teki Seru	Hal 8

TIM REDAKSI

Pengarah	: Arman Syifa
Penanggung Jawab	: Ida Bagus Ketut Wisnu
Ketua	: Ida Ayu Putu Risnawati
Sekretaris	: Budi Yanto
Anggota	Iwan Nugrohadhi
	Muhammad Khibran
	I Gusti Agung Istri Agung
	Luh Lindyawati
	Wiranto

REDAKSI ORTI MENGUCAPKAN..





ARMAN SYIFA

Si Master of Acc



Nama lengkapnya Arman Syifa, kelahiran Garut, 4 April 1969. Orang yang kita kenal saat ini sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Awal karirnya di BPK RI adalah sebagai staf Administrasi Umum Nonfungsional di Sekretariat Jenderal pada tahun 1990.

Ayah dari Ihsan Mukhtar (20), Ismail (19), Muhammad Ilyas (16), Ahmad Abdul Karim (12), Umar Sulthonan Nashiro (10), Hamila Dzakiya (7) dan Luqman Qory Ramadhan (5) tersebut merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan lulusan Universitas Case Western, Ohio Amerika Serikat.

Sebelum mendapatkan amanah sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali pada Agustus 2013, suami dari Tati Pujiati (45) ini menjabat sebagai Kepala Subauditorat di Auditorat Keuangan Negara (AKN) I. Tepatnya Kasubaud I.A.1 yang memeriksa Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara serta Markas Besar TNI.

Arman Syifa meyakini bahwa setiap tugas yang diembannya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dalam dirinya selalu ditanamkan keyakinan bahwa menjadi pemimpin adalah tugas yang mulia. Selain itu, dia percaya bahwa kepemimpinan seseorang akan dipertanggungjawabkan kelak di akherat.

Dengan kesadaran penuh, alumni salah satu Perguruan Tinggi Amerika tersebut tidak pernah membedakan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Baginya, keberhasilan sebuah organisasi dapat berjalan baik jika semua komponen dalam organisasi tersebut juga berjalan dengan baik.

“Semua pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Bali mempunyai tugas yang sama pentingnya, entah itu pemeriksa, penunjang dan pendukung, pengemudi bahkan *cleaning service* sekalipun”, ujarnya dalam berbagai kesempatan.

Menurutnya, tidak ada hambatan yang cukup berarti yang ia hadapi selama menjadi Kepala Perwakilan. Hal tersebut dikarenakan semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali mempunyai independensi, integritas dan profesionalisme serta dapat bekerja sama dengan baik. Selain itu, keterbukaan antara BPK Perwakilan Bali dengan *auditee* yang selama ini sudah terjalin dengan baik, menjadikan tugas masing-masing menjadi semakin mudah.

“Semua pasti berlalu, hadapilah dengan iman dan senyuman” itulah nasehat orang tua yang selalu dipegangnya. Hidup di dunia hanya sementara. Setiap ujian ataupun cobaan, harus diselesaikan dengan sabar dan ketekunan, maka ujian dan cobaan yang sedang dihadapi akan mudah diatasi. Begitu kurang lebih Arman Syifa mengartikan nasehat orang tuanya tersebut.

Dalam setiap arahan kepada bawahannya, pria berusia 46 tahun ini selalu menekankan kepada para stafnya agar selalu bekerja dengan ikhlas, jujur dan tanggung jawab serta selalu mengingat janji Pegawai Negeri Sipil.

Disela-sela waktu senggangnya di Bali, Kepala Perwakilan yang terkenal suka bercanda ini, menyempatkan diri untuk menjaga kesehatan tubuhnya dengan berolahraga. Bersepeda, bermain *gateball* dan panahan adalah olahraga yang dipilihnya. Alasan dipilihnya ketiga olah raga ini cukup sederhana, “Olahraga ini secara ilmiah sudah teruji memberikan manfaat bagi kesehatan”, ujarnya.

Selain alasan kesehatan, olahraga juga merupakan ajang untuk mendekati diri dengan bawahannya. Hampir setiap Sabtu pagi, Arman Syifa dan beberapa pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali mengayuh sepeda mengelilingi keindahan pulau Bali. Arman Syifa pun membentuk komunitas Gowes BPK Bali pada akhir 2014.

“Semua pasti berlalu, hadapilah dengan iman dan senyuman” itulah nasehat orang tua yang selalu dipegangnya.

Suka dan duka dirasakan oleh pria yang senang menyebut dirinya sebagai *master of acc* ini, selama melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Perwakilan. Jauh dari keluarga dan kampung halaman adalah salah satu duka yang ia rasakan ketika sedang menjalankan tugas. Bercanda dan bertemu dengan teman-teman seperjuangan adalah obat yang dapat meredakan rasa rindunya kepada istri, anak dan keluarganya.

Pria yang menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali sejak 2013 ini, berharap apa yang sudah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Bali dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Begitupun dalam setiap pemeriksaan, rekomendasi yang diberikan harus memiliki nilai dalam mendorong perbaikan dan kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, harapannya kepada pegawai penunjang dan pendukung adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dengan tingkat kunjungan tamu yang sangat tinggi di Perwakilan Bali ini.

Arman Syifa menjadi lakon hidup yang sukses menggapai mimpi-mimpinya. Sebuah kemenangan yang dilaluinya dengan cara meniti jalan hidup dengan penuh kesadaran bahwa Yang Maha Esa akan senantiasa melindungi dan menolongnya.



Jalan Panjang Menuju

AKRUAL

Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat empat basis yang umum digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, yaitu basis kas, modifikasi kas, modifikasi akrual dan akrual penuh.

Dari keempat basis tersebut, basis kas dan akrual adalah dua basis yg paling sering digunakan. Basis kas akan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan.

Dalam akuntansi Pemerintah Pusat yang saat ini diterapkan sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004, Pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Basis ini pada dasarnya adalah basis kas dengan penerapan akrual pada akhir periode pelaporan. Dengan basis kas menuju akrual, pendapatan diakui pada saat kas diterima ke Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara. Basis kas untuk pendapatan dan belanja tersebut akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan dengan adanya jurnal korolari, pencatatan akrual pada akhir periode akan menghasilkan Neraca.

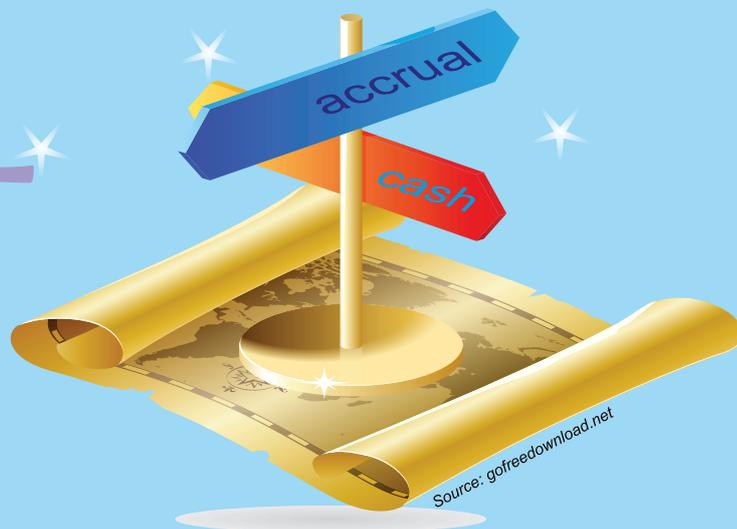
Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual.

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Perubahan basis akuntansi dari *cash toward accrual* menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual.

Dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, beberapa langkah yang telah dan



akan dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tahun 2010

- Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual;
- Menyiapkan dan menetapkan SAP berbasis akrual; dan
- Menyiapkan Rencana Implementasi SAP berbasis akrual.

Tahun 2011

- Menyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual,
- Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual

Tahun 2012

- Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual,
- Melaksanakan capacity building berupa training dan sosialisasi SAP berbasis akrual kepada seluruh stakeholders yang terlibat,
- Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan.

Tahun 2013

- Melakukan uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan capacity building,
- Penyusunan peraturan yang berkaitan

Tahun 2014

- Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam Laporan Keuangan, tetapi Laporan Keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang berbasis CTA.
- Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan basis akrual,
- Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan.

Tahun 2015

- Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Laporan Keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual.



Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Walaupun basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010).

Dampaknya pada LK Pemda

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:

KATEGORI	LAPORAN KEUANGAN
Laporan Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekiuitas (LKE)
	Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dari uraian di atas terlihat ada tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah;
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah; dan
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Source: diolah dari berbagai sumber



RAKOR OPTIMALISASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK DIGELAR DI BALI

Denpasar, Jumat, 24 April 2015 -

Sebagai upaya proaktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI melakukan kegiatan rapat koordinasi optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya. Kali ini daerah yang dipilih adalah Provinsi Bali.

Kegiatan Rakor ini sendiri dihadiri oleh para pejabat utama BPK RI, antara lain Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar, Tortama KN VI, Sjafrudin Mosii, serta para pejabat struktural BPK RI lainnya.

Dari para peserta undangan yang hadir antara lain, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, serta para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD di wilayah Provinsi Bali. Hadir pula sebagai tamu undangan, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto.

Terpilihnya Bali tidak terlepas dari fakta bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di Bali berada di atas rata-rata nasional. Bali berhasil menindaklanjuti 80% rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melampaui rata-rata nasional yang sebesar 50%.



PELUNCURAN PERPUSTAKAAN DAN KANTIN BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

Denpasar, Senin, 11 Mei 2015 - BPK

Perwakilan Provinsi Bali pada Senin (11/05), melakukan kegiatan peluncuran ulang Perpustakaan dan kantin kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Kegiatan peluncuran ulang perpustakaan dan kantin ini merupakan puncak dari beberapa kegiatan perubahan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali sejak Maret 2015.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa, ini sendiri merupakan bagian dari proyek perubahan dalam Diklat PIM III, Kepala Sekretariat, Ida Bagus Ketut Wisnu dan Diklat PIM IV, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha, Ida Ayu Putu Risnawati.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan menekankan pentingnya publikasi kepada seluruh pegawai mengenai informasi yang terkait dengan perpustakaan.

Adapun yang terkait dengan kantin, Kepala Perwakilan mengharapkan hal ini dapat menunjang kinerja para pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum pegawai kini tidak perlu lagi mencarinya keluar, tapi dapat memanfaatkan kantin yang sudah ada.



BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI GELAR KEGIATAN PEMBAHASAN AKHIR DAN PERUMUSAN ACTION PLAN LHP LKPD TA 2014

Denpasar, 28 Mei 2015 - Pada Kamis (28/05) BPK Perwakilan Provinsi Bali berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pembahasan akhir dan perumusan *action plan* atas rekomendasi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014.

Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian konsep rekomendasi yang akan diberikan terkait temuan yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan lapangan, sekaligus untuk merumuskan *action plan* atas rekomendasi yang BPK berikan.

Acara ini dilaksanakan di ruang aula lantai I gedung BPK Perwakilan Provinsi Bali dan dihadiri oleh sekira 100 orang peserta, mulai dari para Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektorat dan juga jajaran SKPD terkait di Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan laporan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam standar pemeriksaan BPK RI. Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya semua rekomendasi pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti oleh entitas.

PERKUAT KOORDINASI, KEJARI NEGARA LAKUKAN EKSPOSE DENGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

Denpasar, Kamis, 25 Juni 2015 - Kejaksaan Negeri Negara (Kejari Negara) adakan ekspose dengan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Ekspose yang berlangsung selama dua jam tersebut merupakan koordinasi antara BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Jembrana.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Gedung BPK Perwakilan Provinsi Bali dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jembrana, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Fungsional Pidana Khusus. Sedangkan dari BPK Perwakilan Provinsi Bali dihadiri oleh Kepala Subauditorat Bali II, Pengendali Teknis, Ketua Tim Senior, Kepala Subbagian Hukum serta Staf Subbagian Hukum.

Kajari Negara, Anton Delianto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya ekspose antara Kejari Negara dengan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Kegiatan ekspose ini diharapkan dapat memberikan sinergi yang baik antara BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan APH di wilayah Provinsi Bali. Sekaligus juga dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Jembrana.



Gowes yuk..



Jutaan orang bilang bahwa Bali adalah surga dunia. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kunjungan wisatawan asing maupun domestik yang berlibur di Pulau Bali.

Sinergi antara budaya dan pariwisata yang ada, menjadikan Bali semakin dirindukan oleh para wisatawan di seluruh penjuru dunia.

Keluarga BPK Perwakilan Provinsi Bali pun tidak mau ketinggalan menikmati pemandangan pulau Bali. Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali memiliki cara tersendiri dalam mensyukuri nikmat Tuhan

atas keindahan Pulau Bali. Mengelilingi setiap jengkal Pulau Bali dengan bersepeda adalah salah satu cara yang dilakukan.

Hampir setiap Sabtu pagi, Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali yang tergabung dalam komunitas Gowes BPK Bali menikmati pemandangan Bali dengan bersepeda.

Selain dapat menikmati keindahan alam dan budayanya, dengan bersepeda badanpun menjadi sehat dan kuat.

“Sambil berenang minum air, dua keuntungan sekaligus yang didapat jika bersepeda di Pulau Bali”, begitulah kata Pembina Komunitas Gowes BPK Bali, Arman Syifa yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Pantai Kuta, Pantai Sanur, Puri Taman Ayun serta Pantai Nusa Dua menjadi saksi bahwa Komunitas Gowes BPK Bali pernah menginjakkan roda sepedanya di tempat tersebut. Tak hanya jalan datar dan mulus yang pernah dilalui, jalan persawahanpun

pernah dilalui Komunitas Gowes BPK Bali.

“Bersepeda adalah berpetualang dan membuat hidup lebih berwarna”, begitulah kira-kira kata Ahmad Benawa, salah satu anggota Komunitas Gowes BPK Bali.

Tertawa bersama saat meluncur di jalan menurun, membuat wajah menjadi lucu ketika mengayuh tanjakan adalah warna yang dilukiskan Komunitas Gowes BPK Bali.

Selain sebagai ajang berolahraga, komunitas gowes ini juga tidak pernah ketinggalan untuk mengabadikan setiap momen yang mereka dapatkan dengan berselfi ria. Di tengah perjalanan pulang, untuk memulihkan tenaga, selalu disempatkan mencicipi kuliner yang ada di Bali.

Itulah cerita Komunitas Gowes BPK Bali, menikmati keindahan setiap jengkal Pulau Bali dengan hal positif dan bermanfaat. Tertarik gabung? Gowes yuk..

atau nge-Gateball ajah..

Selain tenis, senam yoga, bersepeda dan futsal, sebagian Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali menghabiskan aktifitas Jumat pagi dengan bermain Gateball.

Olahraga permainan yang berasal dari Hokaido Jepang tersebut dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim terdiri atas tiga pemain. Dua tim tersebut adalah tim merah dan tim putih. Tim merah dengan bola ganjil (1, 3 dan 5) sedangkan tim putih memegang bola genap (2,4 dan 6).

Olahraga yang pernah dilombakan di BPK Perwakilan Bali saat perayaan hari ulang tahun BPK RI ke 68 memerlukan beberapa perlengkapan untuk memainkannya. Perlengkapan tersebut diantaranya adalah tongkat pemukul, bola, gawang dan goal-pole serta lapangan.

Tidak membutuhkan banyak tenaga untuk memainkan olahraga yang sangat digemari oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Ida Bagus Ketut Wisnu. Menurutnya, “Gateball

merupakan olahraga permainan yang perlu dikembangkan”.

Gateball adalah olahraga yang menyenangkan dan dapat dimainkan dengan mudah, di manapun dan dengan siapapun. Olahraga yang sudah dimainkan di 30 negara dan lebih dari 10 juta orang dapat dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan dari semua generasi.

“Permainan ini sangat menyenangkan dan olahraga ini juga bisa membuat terjalinnya keakraban antar pegawai karena olahraga ini memerlukan kerjasama anggota tim” tambah Kepala Sekretariat Perwakilan.

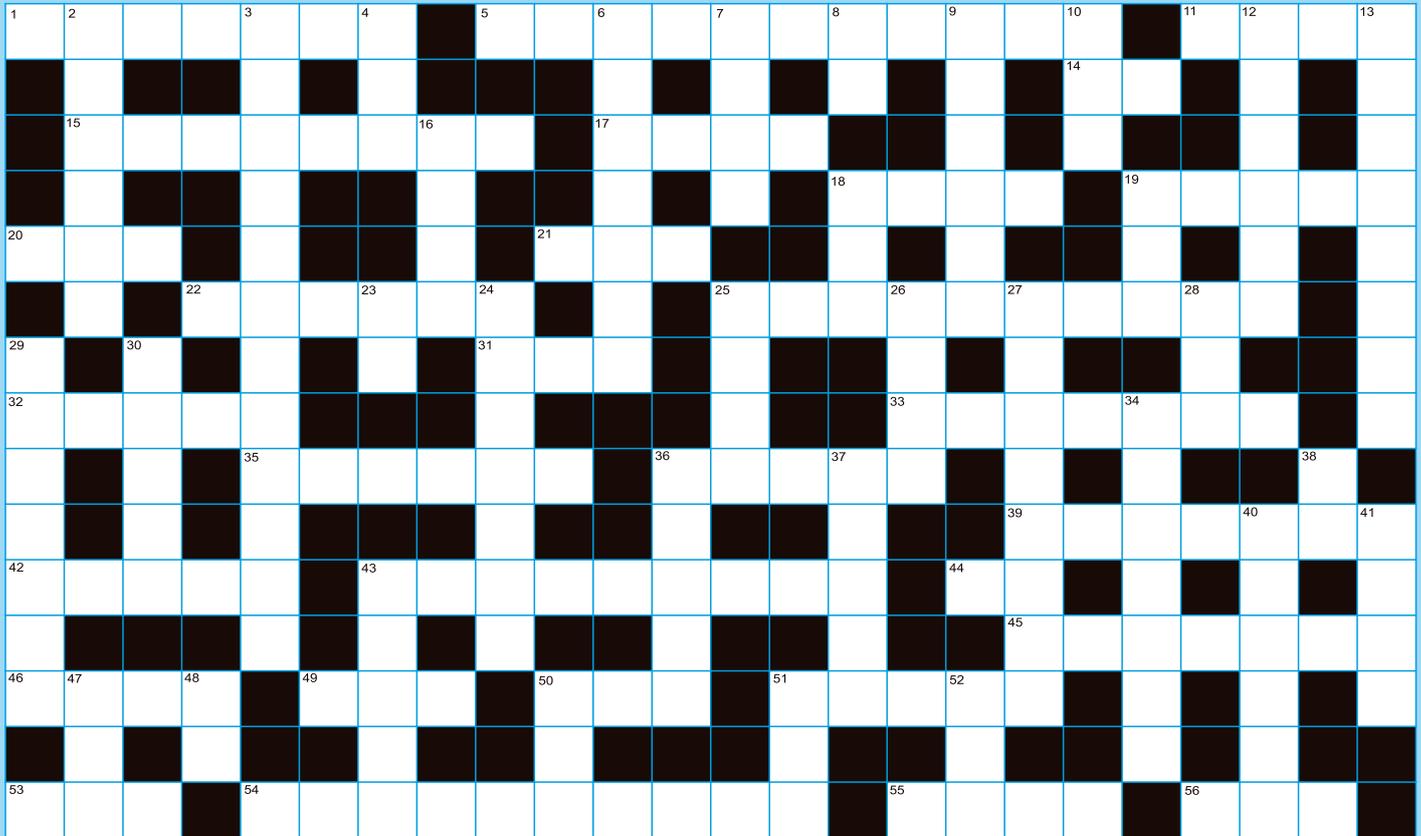
Cara memainkan olahraga yang diciptakan pada

tahun 1947 pun cukup mudah. Pertama, tim merah memukul bola terlebih dahulu kemudian diikuti tim putih sesuai urutan nomor bola. Bola dipukul melewati tiga gawang dan menyelesaikan permainan bila telah menyentuh goal-pole. Pemenang ditentukan oleh jumlah total nilai yang diperoleh selama 30 menit permainan.





TTS (Teka Teki Seru)



Mendatar:

1. Orang yang melakukan audit.
5. Saran yang diberikan pemeriksa kepada auditi.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
15. Tempat kedudukan tentara.
17. Makanan khas Jepang yang terbuat dari rumput laut.
18. Suku bangsa.
19. Dibalik - Pelawak asal Kalimantan bernama asli Indrayana Bidwy.
20. Salah satu alat musik yang berfungsi untuk menjaga ritme dalam sebuah band.
21. Tiga.
22. Basis akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui/dicatat ketika transaksi terjadi.
25. Menolak memberikan pendapat.
31. Melafalkan huruf satu demi satu.
32. Dagang.
33. Output hasil pekerjaan.
35. Catatan perbandingan untung rugi, utang-piutang, pemasukan dan pengeluaran.
36. Cita-cita yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan.
39. Rencana strategis.
42. Olahraga yang digeluti Chris Jhon.
43. Pengelola keuangan.
44. Plat mobil daerah Kedu, Magelang, Purworejo dan sekitarnya.
45. Nama salah satu kota di Prov. Sumatera Utara.
46. Tanda, isyarat.
49. Kasihan.
50. Kubis.
51. Nama depan pemain tengah klub Arsenal asal Spanyol.
53. Badan Pemeriksa Keuangan.
54. Dewan yang mewakili.
55. Pulau Dewata.
56. Bahasa Inggris yang berarti satu.

Menurun:

2. Upload.
3. Yang wajib dilakukan auditi setelah diberikan rekomendasi oleh pemeriksa.
4. Golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik.
6. salah satu jenis pemeriksaan BPK RI.
7. Irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk mengiringi tentara berbaris.
8. Nota Dinas.
9. Terikini; baru saja terjadi.
10. Gosip.
12. Penganan dibuat dari beras ketan, di dalamnya diisi daging cincang (dibungkus dng daun pisang).
13. Kepala Desa Dinas di Bali.
16. Binatang padang pasir.
18. Tempat menyimpan uang.
19. Maskapi milik Pemerintah Belanda.
22. Undang-undang.
25. Benda berbentuk kubus yang biasa digunakan dalam permainan judi.
26. Catatan Atas Laporan Keuangan.
27. Harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.
28. Pertama; Satu.
29. Satuan yang berwujud.
30. Tekun; Tidak malas.
34. Rancangan; buram (rangka sesuatu yg akan dikerjakan).
36. Tinggi harganya.
37. Gas yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang kita hirup apabila bernapas.
38. Doktor.
40. Jembatan kecil.
41. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
47. Elektronik Road Pricing.
48. Tidak.
50. Bola dalam permainan bulu tangkis.
52. Merk speaker portabel yang sangat terkenal.

Ketentuan Penebak:

1. Tulis jawaban langsung di lembar ORTI.
2. Kirim jawaban ke redaksi ORTI di Subbagian Humas dan TU, BPK Perwakilan Provinsi Bali.
3. Tiga orang pengirim pertama yang benar mengisi seluruh kotak, akan mendapatkan hadiah menarik.
4. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada edisi ORTI berikutnya.
5. Kuis ini tidak berlaku untuk staf redaksi.
6. Keputusan redaksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Alamat Redaksi:

Jalan DI Panjaitan No. 2, Renon, Denpasar, Bali 80000
Telp. +62 361 229193 Fax. +62 361 229184, 256205
Email. subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com
Website. www.denpasar.bpk.go.id